



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAHMI FADLI
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 531028

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 8.331.110.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Bangunan Seluas 38 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah Seluas 4.963 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 99.260.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 462 m2/438 m2 di KAB / KOTA PASER, Rp. 657.270.000
6. Tanah Seluas 450.000 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 1.550.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 592 m2/435 m2 di KAB / KOTA PASER, Rp. 1.500.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/167 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.574.580.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.610.000.000**

1. MOBIL, MERCEDES-BENZ C 300 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000



2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
435.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2019, LAINNYA Rp.
375.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 300.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 682.815.158

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 10.923.925.158

III. HUTANG Rp. 2.228.963.424

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.694.961.734

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.